Attoriolong Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah Vol. 20 No. 2 (2022): 119-128
ISSN: 1412-5870

Bate Salapang ri' Gowa, 1935-1946

Isnaeni; Najamuddin; Mustari Bosra
Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM
Isnaenihardiyanti0459@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Bate Salapang pada masa lalu sebagai pemilih dan pelantik Raja Gowa, sebagai pembuat kebijakan bersama Raja Gowa dan sebagai pemerintah otonomi di wilayah mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Bate Salapang di masa kerajaan sangat berperang penting karena Bate Salapang selaku Dewan Hadat suatu dewan rakyat (parlemen) yang menetapkan hukum-hukum dasar pemerintah dan hukum adat. Setelah peralihan dari sistem monarki ke NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Peran Paccallaya memiliki kewanangan dan kekuatan memaksa dan menyelesaikan perselisihan secara tuntas,namun seiring berjalannya waktu peranan paccallaya mulai bergeser digantikan oleh seoranga raja yang disepakati oleh anggota paccallaya. Peran Bate Salapang masa kerajaan hingga sekarang itu tentu sudah berbeda dimana pada masa kerajaan, bate salapang memiliki kekuasaan/wewenang dalam memilih, mengangkat dan menurunkan seorang Raja. Setelah peralihan rezim dimana masa kerajaan sudah beralih ke masa pemerintahan, begitupun dengan peran bate salapang yang sudah tidak lagi sama perannya dimasa sekarang ini karena pemiliahan pemimpin atau Bupati dipilih langsung oleh Rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri atas tahapan: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi arsip dan studi pustaka.

Kata Kunci: Kerajaan Gowa, Paccallayya, dan Bate Salapang

Abstract

This study aims to determine the role of Bate Salapang in the past as the electorate and inauguration of the King of Gowa, as a policy maker with the King of Gowa and as an autonomous government in their area. The results showed that the role of Bate Salapang in the royal period was very important because Bate Salapang as the Hadat Council was a people's council (parliament) that determined the basic laws of government and customary law. After the transition from the monarchy system to the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Paccallaya's role has the authority and power to coerce and resolve disputes completely, but over time the role of paccallaya begins to shift to be replaced by a king who is agreed upon by paccallaya members. The role of Bate Salapang during the kingdom until now is certainly different, where during the kingdom, Bate Salapang had the power or authority to choose, appoint and demote a king. After the transition of the regime where the royal period has shifted to the reign of government, as well as the role of bate salapang which is no longer the same role today because the election of leaders or regents is directly

elected by the people. The method used in this research is the historical method which consists of stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The method of data collection was carried out by means of archive studies and literature studies.

Keywords: Kingdom of Gowa; Paccallayya; Bate Salapang

A. PENDAHULUAN

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memilki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. (Budiarjo, 2008) Negara meliputi kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan pembagaian atau alokasi. (Budiarjo, 2008) diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. Sedangkan bentuk negara menyatakan susunan atau organisasi negara secara keseluruhan, mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur-unsurnya, yaitu daerah, penduduk dan pemerintahannya. Bentuk Pemerintahan Kerajaan atau Monarki. (Artikel, 2016) Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana Raja menjadi Kepala Negara. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Garner menyatakan; setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan.

Salah satu pemerintahan yang memiliki sistem monarki pada saat sebelum masuknya sistem presidensial ialah kerajaan Gowa. Kabupaten Gowa sebagai suatu daerah yang berada dalam wilayah provinsi Sulawesi selatan merupakan Kerajaan Gowa yang terletak 10 km dari kota Makkasar. Pada zaman kerajaan Gowa Pra Islam muncul empat orang raja yang memegang pemerintahan yaitu: 1. Batara Guru, 2. Saudara Batara guru yang dibunuh di talali (nama asli tidak diketahui) 3. Ratu Sapu (Marancai) 4. Karaeng Katangka (Nama asli tidak diketahui). Menjelang terbentuknya kerajaan Gowa, daerah ini terdiri atas Sembilan kerajaan kecil yang disebut *kasuwiyang* yang bergabung dan memebentuk *Bate salapang*, yaitu

1. Tombolo
2. Lakiung
3. Saumata
4. Parang-parang
5. Data
6. Agang je'ne
7. Bisei
8. Kalling
9. Se'ro (Salihin, 2014)

Kesembilan negeri tersebut mengikatkan diri dalam bentuk persekutuan atau pemerintahan fedrasi dibawah pengawasan paccallaya (Ketua Dewan Pemisah). Setelah masa pemerintahan Karaeng Katangka, maka kesembilan penguasa/raja kecil tersebut membentuk sebuah gabungan yang dikenal oleh seorang pejabat yang disebut Paccallaya yang jabatannya sebagai hakim tertinggi, bilamana terjadi sengketa diantara penguasa-penguasa itu. Hal ini wajar sebelum munculnya *Paccallaya* pertikaian bahkan peperangan diantara negara-negara yang tergabung sebagai daerah-daerah purba sering terjadi (J. Bahri, n.d.).

Di antara kerajaan-kerajaan kecil di atas sering terjadi perselisihan yang kadang meningkat menjadi peran terbuka. Perang dapat diperkecil dengan mengangkat dari kalangan mereka seorang pejabat yang di sebut *paccallaya.* Ia

berfungsi sebagai ketua dewan adat di antara kesembilan kerajaan kecil yang menjadi anggotanya. Di samping itu, ia merupakan arbitrator dalam mendamaikan perselisihan yang mungkin timbul di antara *gallarrang* (penguasa) kerajaan-kerajaan kecil itu. Namun, setiap kerajaan-kerajaan kecil tetap mempertahankan kedaulatan dan otonominya dalam mengatur pemerintahnya sendiri dalam daerah. *Paccallaya* sebagai ketua dewan adat tidak memiliki kewenangan dan kekuatan memaksa dalam menyelesaikan perselisihan secara tuntas, yang menyebabkan kerajaan-kerajaan kecil tidak pernah merasa tenang, bahkan sering timbul perselisihan yang mengarah pada ketidakstabilan. Dengan adanya peperangan tersebut dan sesuai dengan kebutuhan kerajaan, maka sangatlahh dibutuhkan adanya seorang tokoh yang melebihi paccallaya. Mereka menginginkan sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja yang cara kepemimpinannya melebii *paccallaya*, maka bersepakatlah mereka untuk mencari tokoh yang diluar kelompok-kelompok mereka.

Keadaan seperti ini terus berlangsung sampai datangnya Tumanurungyang mempersatukan semua kerajaan kecil itu dalam satu kerajaan yang dinamakan *Butta Gowa* (tanah Gowa) (M. Sewang, 2005). Tumanurung adalah perempuan dianggap berasal dari dunia atas (kayangan)karena siapa dan dari mana tidak diketahui senhingga disebut karaeng Tumanurung *Baine* atau sosok perempuan yang muncul dari atas dan turun disuatu tempat gubuk hitam kalegoa persis diatas sebuah batu disebut *"Takabassia"* yang kemudian disebut Tamalate. Maka semua pemimpin negeri bersatu dan sepakat menetapkan Karaeng Tumanurung Baine sebagai pemimpin utama yang diharapkan mempersatukan mereka, diangkatlah dan dinobatkan sebagai Raja yang bergelar Karaeng *"Sombaya Ri Gowa"*. (Pratama, 2007) Sebagaimana diceritakan oleh orang-orang Gowa bahwa Raja yang pertama memerintah di kerajaan Gowa bernama Tumanurung Bainea. Beliau adalah seorang putri yang turun dari negeri kayangan. Ia sengaja diutus ke Butta Gowa untuk menjadi pemimpin, dimana saat itu, Gowa dilanda persng saudara. Tumanurung bukanlah nama aslinya. Namanya memang tidak diketahui, sehingga masyarakat saat itu memberinya nama Tumanurung, artinya orang yang turun dari kayangan.

Tak ada satu catatan sejarahpun pada masa itu yang bisa mengungkapkan kedatangan Tumanurung di Butta Gowa. Hanya saja,pemikiran masyarakat Gowa saat itu yang masih menganut animisme ditambah dengan pengaruh hindu sebagai akibat dari pengaruh Kerajaan Majapahit (abad IV-XVI), dimana Agama Hindu juga ada pengaruhnya diwilayah timur Nusantara ini. Dalam konsep animisme ataupun Hindu, mempercayai adanya Dewa yang turun dari kayangan juga ada Dewa dari air. Berdasarkan konsep pemikiran itulah, muncul nama Tumanurung yang berarti Ratu Putri yang turun dari negeri kayangan, sedang raja yang datang dari air disebut karaeng Bayo (Bayo = air) yang kelak menjadi suami Ratu Tumanurung (J. Bahri, n.d.).

Konsep tumanurung sebagai Raja Gowa pertama ini juga dianut oleh beberapa daerah bekas kerajaan di Sulawesi Selatan, seperti di Luwu, Bone, Toraja, Enrekang, Mandar dan beberapa daerah lainnya. Sebelum datangnya Tumanurung di Butta Gowa yakni pada masa Gowa purba, dapat diketahu, bahwa ada empat raja yang pernah mengendalikan Gowa yakni :

1. Batara Guru
2. Saudara Batara Guru yang dibunuh oleh Tatali, tak diketahui nama aslinya.
3. Ratu Supu atau Marancai
4. Karaeng Katangka yang nama aslinya tak diketahui (Abdul Razak, 1983).

Diriwayatkan bahwa sejak Raja Gowa pertama hingga Raja Gowa VIII Pakere'tau Tunijallo dipustakan di Tamalatea ialah tempatnya dibangun Istana

Raja Gowa pertama dan merupakan Ibu Kota pertama Kerajaan Gowa sebelum berpindah ke Somba Opu. Masa sesudah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, yang menandai gabungan seluruh daerah Nusantara kedalam Negara kesatuan, rakyat Gowa tetap tampil berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Daerah Gowa merupakan basis utama gerakan seperti Lipang Bajeng, Macan Putih (Macan Keboka) dan Harimau Indonesia, beserta pangkalan tokoh-tokoh seperti Wolter Menginsidi,Emmi Saelan dan Ranggong Daeng Romo.

Balla Lompoa Ri Gowa dibangun sejak tahun 1936 setelah diangkat Raja Gowa XXXV, I Mangngi-mangngi Daeng Matutu, Karaeng Bontonompo yang bergelar Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin. Dengan dibangunnya Balla Lompoa sebagai tempat kediaman sekaligus juga sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Gowa. Sebelum Balla Lompoa dibangun sudah ada tempat kegiatan untuk melaksanakan pemerintahan Kerajaan Gowa yakni Kantor Kontrolir onderafdeling yang berlikasi tidak jauh dari Balla Lompoa dengan diantarai Lapangan Bungaya,tepatnya di lokasi bekas Kantor Bupati Kepada Daerah Tingkat II (yang lama).

Setelah Raja Gowa XXXV wafat 1946, maka dia digantikan oleh Andi Ijo Karaeng Lalolang Putera I Mangimangi Daeng Matutu Karaeng Bontonompo (Raja Gowa XXXV) dilantik pada tanggal 25 April 1947, Karaeng Lalolang menjadi Raja Gowa terakhir yakni ke XXXVI, walaupun pengangkatannya disahkan pemerintah Belanda pada September 1946. Sebelum jadi raja, Andi Ijo pernah mendampingi ayahnya dalam pemerintahan dengan jabatan Tumailalang (Jabatan inti di bawah raja). Nilai Religius di samping punya nilai Historis, Balla Lompoa juga memiliki nilai religius yang berpedoman pada falsafah hidup manusia. Bahwa masyarakat Gowa memiliki pandangan kosmologis dan berpikir bahwa hidup ini hanya tercapai bila antara makrokosmos dan mikrikosmos senantiasa terjalin hubungan harmonis. Nilai religius lainnya adalah adanya pandangan bahwa alam raya dari tiga susun, yakni dari dunia atas,tengah,dan bawah. Hal ini dalam bentuk rumah adat Makassar yang terdiri dari tiga bagian yakni pada bagian atas rumah disebut loteng (Pammakkang), bagian tengah merupakan badan rumah (Kale Balla),dan pada bagian bawah rumah disebut kolom rumah (Siring).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian sejarah yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan maksud mengetahui ikwal kejadian-kejadian yang telah berlangsung pada masa lampau. Penelitian ini menggunakan data primer maupun sekunder dengan tahapan kerja : heuristik (pengumpulan data), kritik (evaluasi data), interpretasi (penafsiran data), historiografi (rekontruksi sejarah dalam bentuk tulisan).

1. Heuristik

Heuristik merupakan tahap awal dalam penelitian sejarah, yakni mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang terkait dengan topik penelitian,heuristik dapat juga diartikan sebagai kegiatan berupa penghimpunan jejak-jejak masa lampau. Penulis dalam mengumpulkan data yaitu menggunakan cara penelitin pustaka atau studi pustaka dengan mengumpulkan sumber-sumber buku dan melakukan wawancara dengan pihak terkait.

a. Penelitian Pustaka

Penelusuran bahan pustaka dilakukan di Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, perpustakaan Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar, perpustakaan umum Multi Media Makassar dan juga pencarian data melalui jurnal elektronik,dan buku elektronik.

2. Kritik Sumber

Pada tahapan ini data yang telah dikumpulkan melalui beberapa metode yang penulis sebelumya akan dilakukan kritis sumber untuk menentukan keaslian data kebenaran sumber sejarah. Sumber yang telah didapatkan dari pengumpulan data kemudian akan dilakukan verivikasi terlebih dahulu karena tidak semua data yang diperoleh dapat digunakan pada penelitian ini.

3. Interpretasi

Sebelum sampai pada tahap historigrafi, terlebih dahulu fakta sejarah tersebut digabung- gabungkan (disintesakan) berdasarkan pada subjek kajian, dalam kaitan itu tema pokok kajian merupakan kaidah yang dijadikan sebagai kriteria dalam menggabungkan data sejarah. Data yang tidak berkaitan dengan tema studi dipisahkan agar tidak mengganggu peneliti merekontruksi peristiwa sejarah.

4. Historigrafi

Berbagai pertanyaan mengenai masa silam yang telah disintesakan selanjutnya ditulis dalam bentuk kisa sejarah atau historigrafi. Sampai pada tahapan ini, sejarawan akan mengadakan apa yang di katakan G. J Renier sebagai sentralisasi dalam cerita sejarah. Metode sentralisasi dilakukan berdasarkan bacaan ahli sejarah tentang dunia dimana hidup, pengalaman dan kepercayaanya. Menurutnya tidak ada ketentuan khusus yang harus diikuti oleh ahli sejarah, mereka bebas mensentralisasikan peristiwa- peristiwa sejarah sesuai dengan prinsip - prinsip yang dianutnya. Meskipun demikian setiap tuturan sejarah menurut Renier harus memperhatikan tiga aspek utama yaitu : kronologi, kualitas, dan imajinasi. (Majid & Hamid, Pengantar Ilmu Sejarah, 2008)

C. TINJAUAN UMUM PENELITIAN

Keadaan geografis Kerajaan Gowa dalam pembahasan ini adalah menyangkut letak dan batasan-batasan kerajaan Gowa. Pada abad ke-16 M, di Sulawasi Selatan berdiri Kerajaan Gowa dan Tallo. Kedua kerajaan tersebut kemudian pada tahun 1528 bergabung dengan nama Kerajaan Makassar yang beribu kota di Sombaopu. Wilayah kerajaan Makassar atau Gowa meliputi provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Secara goegrafis Kerajaan Gowa sangat strategis. Letaknya dijalur pelayaran Nusantara yang merupakan rute perdagangan. Sehingga kerajaan Gowa berkembang menjadi kerajaan yang besar dan berkuasa dijalur perdagangan Nusantara. (Nurasiah, 2009)

Kerajaan Makassar atau Gowa adalah sebuah kerajaan yang berada di Sulawesi Selatan. Makassar terletak di pantai barat Semenanjung Sulawesi Selatan yang memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Hal itu menjadikan Makassar sebagai pusat persinggahan para pedagang, sekaligus Kerajaan Makassar atau Gowa berkembang menjadi kerajaan besar san berkuasa atas jalur perdagangan Nusanrata.

Kerajaan Makassar sebenarnya merupakan persekutuan dari beberapa kerajaan pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan. Menurut cerita, di Sulawesi Selatan pada abad ke-16,terdapat beberapa kerajaan bercorak Hindu, di antaranya Gowa,Tallo, Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidenreng. Masing-masing Kerajaan ini membentuk persekutuan sesuai dengan pilihan masing-masing (B. Bahri, 2016)

Dari beberapa kerajaan tersebut, ada dua kerajaan, yakni kerajaan Gowa dan Tallo, membentuk persekutuan pada tahun 1528. Persekutuan itulah yang kemudian melahirkan suatu kerajaan yang lebih dikenal dengan sebutan kerajaan Makassar. Nama makassar sebenarnyya adalah ibu kota dari Kerajaan Gowa, dan sekarang masih digunakan sebagai nama ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. (Abimanyu, 2014)

Makassar sebagai nama kerajaan kembar Gowa-Tallo dengan nama kerajaan atau kesultanan Makassar, sebagai sebuah kerajaan yang paling berpengaruh di Sulawesi atau bagian timur Indonesia. Orang Makassar yang mendiami jazirah selatan Sulawesi, sebagian dari mereka mendiami daerah sepanjang pesisir muara sungai jenneberang dan Tallo negeri-negeri dalam Nusantara disebut: Tombolo, Lakiung, Parang-parang, Duta aging, Je'ne bidu, dan Kallin. Negeri ini bersepakat bergabung dan mengangkat seoraang tokoh perempuan "Tumanurung" dan menjadikan Raja. Tokoh pemerintahan diatas dunia. Negeri gabungan ini diberi nama Gowa. Makassar, sebagai ibu kota kerajaan Bandar niaga yang tumbuh setelah jatuhnya Malaka ketangan Portugis pada tahun 1511 dan dijadikan pusat terdepan kerajaan Makassar yang mewadahi benteng Somba Opu, Panakkukang, dan ujung Pandang. (Wahid, 2007)

D. PEMBAHASAN

1. Peranan Bate Salapang Pada Masa Lalu Sebagai Pemilih Dan Pelantik Raja Gowa

Sebelum Kerajaan Gowa terbentuk, di daerah yang terletak antara Sungai Je'neberang dan Tallo (sekarang, bagian dari wilayah Kabupaten Gowa dan Kota Makassar) terdapat 9 (sembilan) buah kampung yang didiami oleh penduduk yang dikenal sebagai *Tu Gowa atau Tu Mangkasaraka,* yaitu Tombolo, Lakiung, saumata, Parang-parang (Parangtambung?), Data, Agangje'ne (Pacci'nonganga?), Bisei, Sero', dan Kalling (Kassi?). Kampung-kampung tersebut merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri sendiri dan diperintah/dipimpin oleh seorang raja yang disebut juga sebagai *Kasuwiyang/Gallarang* dengan panggilan/gelar kehormatan sebagai *Daengta/Kare (Karaeng).* Dalam perkembangan selanjutnya, kesembilan kerjaan kecil tersebut bersepakat menggabungkan diri sehingga menjadi "semacam kerajaan federasi."

Berhubung status dan kedudukan mereka sama, maka kesembilan raja dari kerajaan kecil yang berfedasi tersebut mengangkat seorang " penengah " yang disebut *Paccallaya.* Dia bukan raja, tetapi dia bertugas memberi kata putus jika terjadi perselisihan diantara kesembilan raja dari kerajaan-kerjaan kecil tersebut. Entah berapa lama "federasi" kesembilan kerajaan kecil itu terbentuk, datanglah serangan dari kerajaan-kerajaan kecil yang ada disebelah selatan sungai je'neberang, yakti Garassi, Untia, dan Lambengi yang menyebabkan terjadinya peperangan diantara kedua bela pihak.

Meskipun pada akhirnya, peperangan itu dimenangkan oleh kesembilan kerajaan yang berfederasi tersebut, namun mereka mengalami kerugian yang tidak sedikit. Kerugian yang paling mereka rasakan adalah menurunnya kekuatan dan vasilitas kerjaan mereka. Itulah sebabnya sehingga segera setelah peperangan berkhir, timbullah keinginan pacallayya bersama kesembilan raja dari kerajaan-kerajaan kecil tersebut untuk lebih mempererat lagi ikatan kerja sama diantara mereka. untuk itu, diadakanlah perundingan.

Dalam perundingan itu, mereka sepakat untuk melebur negeri mereka kedalam satu kerajaan, yang kemudian dikenal sebagai "Kerajaan Gowa". Persoalan kemudian timbul, ketikan pembicaraan mereka sampai kepadaa penentuan, siapa diantara mereka yang akan diangkat menjadi raja. Oleh karena status dan kedudukan mereka sama, maka tidak seorang pun diantara mereka – termasuk pacallayya – yang bersedia menjadi raja (Najamuddin et al., 2009)

Demi mengharapkan kekuatan dan kemajuan yang lebih pesat dikemudian hari, mereka rela meninggalkan kedudukannya sebagai raja, yang disebut Kasuwiyang/Bate Salapanga, sekaligus sebagai Gallarrang (raja bawahan) atas wilayahnya masing-masing, yang telah diintregasikan kedalam kerajaan Gowa.

Untuk itu maka sepakatlah mereka memohon kepada rewata (batara se're-se'rea=Allah Rabbul Alamin) agar terkenan "menurunkan" kepada mereka seseorang yang akan diangkat menjadi raja. (Mustari, 2010)

2. Peranan Kekuasaan Bate Salapang Sebagai Pembuat dan Kebijakan Bersama Raja Gowa

Peranan bate salapang sebelum terbentuknya dari sistem kerajaan menjadi sistem pemerintahan sebagai Dewan Hadat yang mengatur tatanan sistem pemerintahan, akan tetapi sekarang ini Dewan Hadat bate salapang sudah tidak lagi memiliki pengaruh besar baik dari pemerintahan maupun dikerajaan itu sendiri. Melihat perpecahan yang terjadi bate salapang terbagi atas dua yaitu Bate salapang versi Andi Maddusila dengan Bate salapang versi Andi Kumala Idjo. Ditambah terbentuknya suatu lembaga Adat Daerah (LAD) tentang penataan lembaga Adat dan Budaya daerah. Pola hubungan kekuasaan bate salapang dengan pemerintah sudah tidak erat hubungannya, yang sebelumnya memiliki pola hubungan kekuasaan dengan pemerintah dimasa pemerintahan Ichsan Yasin Limpo, kewenangan pemerintah dalam menetapkan LAD, dalam Bab 1, pasal 1, ayat 3 yang dimaksud ialah Bupati Gowa sebagai Ketua Lembaga Adat Daerah yang menjalankan fungsi dan peran sombayya. Sehingga dewan hadat bate salapang sudah tidak terlalu di perhatikan.

Pola hubungan kekuasaan, yang dimaksud oleh penulis ialah bagaimana pola hubungan kekuasaan bate salapang dengan pemerintah, karena melihat dari zaman sekarang sistem monarki sudah tidak diterapkan dalam tatanan pemerintahan di Indonesia khususnya di Kabupaten Gowa ini yang sebelumnya menganut sistem monarki beralih menjadi sistem presidensial, kemudian wewenang dan kekuasaan baik dari bate salapang maupun dari kerajaan sudah tidak terlalu menonjol seperti yang diterapkan disistem monarki kala itu. Yang dimana pada sistem kerajaan pemimpin kerajaan dipilih oleh lembaga adat dewan bate salapang akan tetapi seiring berjalannya peranannya pun untuk mengangkat seorang Raja berakhir ketika seorang Raja terakhir yang menjadi Bupati Pertama di Kabupaten Gowa.

Dari sinilah bagaimana kita bisa melihat pola hubungan kekuasaan bate salapang dalam ruang lingkup pemerintahan. Selain itu, yang menjadi pokok permasalahan yang penulis temui dalam hal ini bahwa ada sesuatu yang unik yaitu terbentuknya dua lembaga bate salapang, maksud dari terbentuknya dua lembaga adat ini yaitu ada Bate Salapang versi Andi Maddusila dengan Bate Salapang versi Andi Kumala Idjo yang masing-masing mengklaim dirinya Bate salapang yang resmi.

3. Bate Salapang Versi Andi Maddusila

Andi Maddusila Andi Idjo dalam pencalonannya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya melalui musyawarah keluarga dan partai politik yang dimana pencalonan Andi Maddusila Andi Idjo pada dasarnya, setiap kali Andi Maddusila Andi Idjo iku mencalonkan dalam pilkada di Kabupaten Gowa selalu ada musyawarah keluarga untuk memberi dukungan meskipun keluarga *Balla Lompoa* tidak sepenuhnya ikut mendukung alasannya karena faktor internal keluarga mereka saling bersiteru yang dilatar belakangi adanya persaingan agar lebih unggul. Perseteruan yang terjadi terlihat pada penobatan Andi Kumala Idjo yang kemudian muncul protes dari Andi Maddusila mengklaim bahwa dirinya putra mahkota pewaris tahta kerajaan. Maddusila mengaku dia sudah dikukuhkan secara adat ditempat pelantikan raja-raja dan dihadiri sejumlah gallarang termasuk keturunan Tuma Ilalang, keturunan Tuma Bicara, Tukajannanga serya sejumlah pembesar kerajaan Gowa yangbada termasuk para keluarga juga yang sudah sepakat menunjuk Andi Maddusila Andi Idjo untuk menjadi raja setelah

ayahnya Andi Idjo raja Gowa Ke-36. Dianggap bahwa garis besar keturunan raja-raja Gowa yang benar-bernar murni adalah Andi Kumala Idjo sementara yang selama ini dilantik sebagai raja Gowa adalah Andi Maddusila Andi Idjo dikarenakan Andi Kumala Idjo berada pada posisi pemerintahan saat ini. Keseharian Andi Kumala mengabdi dalam bidang pemerintahan di Kabupaten Gowa dan kini masih menjabat sebagai Camat Somba Opu, wilayah pusat Kerjaan Gowa. Sehingga hal inilah yang membuat pihak keluarga Andi Kumala Idjo tidak memberi dukungan terhadap pencalonan Andi Maddusila Andi Idjo. (K, 2010). Ketika para bangsawan sudah tidak memiliki wilayah kekuasaan dimasa pemerintahan saat ini membuat ruang kontribusi para keturunan bahsawan mekin sempit.

Budaya adalah suatu pola yang merupakan kesatuan dari pengetahuan, kepercayaan, serta kebiasaan yang tergantu kepada kempuan manusia untuk belajar dan menyebarkannya kegenerasi selanjutnya. Budaya juga dapat diartikan sebagai kebiasaan dari kepercayaan, tatanan sosial, dan kebiasaan dari kepercayaan, tatanan sosial, dan kebiasaan dari kelompok ras, kelompok kepercayaan, atau kelompok sosial. (Habibi, 2006)

a. Bate Salapang Versi Andi Kumala Idjo yang juga eksis dalam mempertahankan nilai-niai Kerajaan Gowa.

Selama masih hidupnya lembaga adat bate salapang itu sangat berperang penting dalam pemerintahan. Bate Salapang ini sangat penting baik bagi pemerintah maupun masyarakat karena bate salapang memiliki peran menjaga nila-nilai kebudayaan. Bate salapang di kabupaten gowa ini memang tidak dapat tergeser dalam melestarikan nilai-nilai budaya kerajaan yang turun temurun.

4. Pengaruh Bate Salapang dalam Mengatur Kerajaan Gowa, 1935-1946

Bentuk pemerintahan Kerajaan Gowa di bawah pimpinan Tumanurung, yakni raja Gowa yang pertama, mengandung unsur-unsur demokrasi yang terbatas. Antara raja Gowa yang pertama (tumanurung) disatu pihak paccallaua bersama kasuwiang salapaanga dan lain pihak ada dibuat sebuah sebuah ikrar atau perjanjian. Dalam perjanjian itu disebutkan tentang pembagian tugas dan batas-batas wewenang antara raja yang memerintah disatu pihak dan rakyat yang di perintah yang diwakili oleh kasuwiang salapang di lain pihak (Najamuddin et al., 2009).

Dalam ikrar atau perjanjian yang dibuat oleh raja Gowa yang pertama dan kasuwiang salapanga itu dapat dilihat dengan jelas bahwa pada mulanya pemerintahan Kerajaan Gowa mengandung unsur-unsur demokrasi yang terbatas. Akan tetapi lambat laun unsur-unsur demokrasinya menjadi kabur dan unsur-unsur Kerajaan mutlak (absolute monar-chie) makin lama makin menonjol. Raja seolah-olah menguasai seluruh hidup dan matinya rakyat. Kehendak raja Gowa adalah undang-undang dan tidak boleh dibantah.

Memang benar ada lembaga perwakilan rakyat yang disebut kasuwiang salapanga atau bate salapanga, akan tetapi lembaga ini tidak mempunyai arti yang lebih dari pada apa yang disebut dewan atau majelis sembilan orang untuk memilih raja. Para anggota bate salapanga itu tidak mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang atau peraturan-peraturan. Mereka tidak mempunyai wewenang untuk menjalankan pemerintahan di seluruh kerajaan. Mereka harus taat dan menjalankan segala perintah raja. Bahkan kemudian mereka pun tidak lagi merupakan badan penasehat. Raja memeritah secara mutlak. Sabda baginda merupakan undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Di bawah karaeng bontoala atau anrong-guru-lompona tu bontoala ada lagi pemimpin-pemimpin orang-orang Bontoala yang disebut anrong guruna tu bontoalaka. *Bate-anak-karaeng*. Mula-mula daerah kekuasaan 'bate anak karaeng' merupakan daerah-daerah yang bebas dan berdiri sendiri. Kemudian

daerah-daerah ini dikalahkan dan menjadi daerah takluk Kerajaan Gowa, dan daerah-daerah itu dihadiakan oleh raja Gowa kepada salah seorang "anak karaeng" atau anak raja/anak bangsawan yang mungkin dianggap berjasa. "Anak karaeng" inilah yang menjadi raja kecil atau penguasa di daerah "bate-anak-karaeng" itu. Semua orang di daerah itu harus tunduk dan melaksanakan segala perintah "anak karaeng" yang mendapat hadiah dari raja Gowa itu. Lazimnya mereka yang memperoleh daerah "bate-anak-karaeng" itu masih berkeluarga dekat juga dengan raja yang berkuasa. Oleh karena itu maka tidaklah terlalu mengherankan jikalau di dalam ucapan-ucapan adat yang resmi para "anak-bate-salapang" ini didudukkan di tempat yang terhormat. Bahkan sering di tempat yang lebih tinggi tingkatnya dari pada para anggota bate salapanga. *Sabannara* atau syahbandar meupakan juga jabatan yang cukup penting di dalam Kerajaan Gowa yang merupakan Kerajaan Maritim. Sabannra membantu raja Gowa mengurus soal keluar masuknya perahu-perahu di pelabuhan Kerajaan. Sabannara ini mengurus soal pemasukan uang pajak bea dan cukai. Selain itu sabannara sering ditugaskan mengurus soal pemasukan uang untuk harta kekayaan raja sendiri. Dahulu Kerajaan Gowa mempunyai dua orang sabannara, yakni Sabannara Towa dan Sabannara Lolo. Pangkat sabannara biasanya dijabat oleh seorang bangsawan, keturunan atau keluarga raja. Bahkan semua jabatan penting yang sudah kami sebutkan tadi, dapat mungkin dijabat oleh orang-orang bangsawan keluarga raja.

E. KESIMPULAN

Peranan Bate Salapang di masa kerajaan sangat berperang penting karena Bate Salapang selaku Dewan Hadat suatu dewan rakyat (parlemen) yang menetapkan hukum-hukum dasar pemerintah dan hukum adat. Bate Salapang bersama Paccallayya sebagai hakim tertinggi yang paling berkuasa dan juga berfungsi sebagai dewan hadat yang sebelumnya memiliki wewenang dalam sistem pemerintahan kerajaan Gowa yaitu berhak mengangkat, memilih, dan menurut seorang Raja dari kedudukannya sebagai raja apabila tidak sesuai dengan jalannya pemerintahan kerajaan. Namun seiring berjalannya waktu peranan paccallaya mulai bergeser digantikan oleh seorang raja yang telah disepakati, pun sudah mulai tergeser pada saat peralihan sistem monarki ke presidensial yang menganut sistem demokrasi.

Peran Bate Salapang masa kerajaan hingga sekarang itu tentu sudah berbeda dimana pada masa kerajaan, bate salapang memiliki kekuasaan/wewenang dalam memilih, mengangkat dan menurunkan seorang Raja. Setelah peralihan rezim dimana masa kerajaan sudah beralih ke masa pemerintahan, begitupun dengan peran bate salapang yang sudah tidak lagi sama perannya dimasa sekarang ini karena pemiliahan pemimpin atau Bupati dipilih langsung oleh Rakyat.

Pola hubungan kekuasaan bate salapang dengan pemerintah, melihat dari zaman sekarang sistem monarki sudah tidak diterapkan dalam tatanan pemerintahan di Indonesia khususnya di Kabupaten Gowa ini yang sebelumnya menganut sistem monarki beralih menjadi sistem presidensial, kemudian wewenang dan kekuasaan baik dari bate salapang maupun dari kerajaan sudah tidak terlalu menonjol seperti yang diterapkan disistem monarki kala itu. Yang dimana pada sistem kerajaan pemimpin kerajaan dipilih oleh lembaga adat dewan bate salapang akan tetapi seiring berjalannya peranannya pun untuk mengangkat seorang Raja berakhir ketika seorang Raja terakhir yang menjadi Bupati Pertama di Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Razak, D. P. (1983). *Sejarah Gowa.* Sulselra: Yayasan Kebudayaan Sulselra.

Abimanyu, S. (2014). *Kitab Kerajaan Terlengkap Kearifan Raja-Raja Nusantara.* Jogjakarta: Laksana.

Artikel, t. (2016). *Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan.* Meylita Hardiyanti.

Bahri, B. (2016). Perebutan Panggadereng di Kerajaan LOkal di Jazirah Sulawesi Selatan Abad XV-XVII. *Istoria: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, *12*(2), 97–104.

Bahri, J. (n.d.). ADRT (2021). *Integrasi Nilai Karakter Pada Pembelajaran Sejarah Lokal (Muhammad Syukur (Ed.)). Media Sains Indonesia*.

Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pestaka Utama.

Habibi, A. K. (2006). *Antropologi Tubuh.* Yogyakarta: LIKS.

K, F. (2010). *Pudarnya Pamor Bangsawan Dan Dinamika Pilkada Di Kab. Gowa (Studi Terhadap Pencalonan Andi Maddusila Andi Idjo.* Makassar: Skripsi, Fak Ushuluddin Filsafat Dan Politik UIN Alauddin Makassar.

M. Sewang, A. (2005). *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI Sampai Abad XVII.* Yayasan Obor Indonesia.

Majid, M. S., & Hamid, A. R. (2008). *Pengantar Ilmu Sejarah.* Makassar: Rayhan Intermedia.

Mustari, B. (2010). *Susur Galur Sakaria Daeng Ronrong.* Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Najamuddin, N., Patahuddin, P., Bahri, A., & Rasyid, M. R. (2009). *Sulawesi Selatan Tempo Doeloe (Muzaik sejarah Lokal)*. Raihan Intermedia.

Nurasiah. (2009). *Kerajaan Nusantara.* Jakarta: Mediantara Semesta.

Pratama, A. D. (2007). *Syech Yususf Al Makassary.* Nala Cipta Lierra.

Salihin, S. (2014). *Peta Politik Di Sulawesi Selatan Pada Awal Islamisasi.* Makassar: Makassar Alauddin University Press.

Wahid, S. (2007). *Manusia Makasssar.* Makassar: Refleksi.